

**Kerjasama Indonesia-
Thailand Dalam
Pemberantasan Narkoba
Menuju Drug-Free ASEAN
2015**

Frequency of International Relations
September, Vol 4 (1) 83-107
© The Author(s)
fetrian.fisip.unand.ac.id
Submission track :
Submitted : May 30, 2022
Accepted : June 1, 2022
Available On-line : June 8, 2022

**Sarah Tabitha, Nurmasari Situmeang,
Wiwiek Rukmi Dwi Astuti**

Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta
Sarahtabitha@upnvj.ac.id, nurmasarisitumeang@upnvj.ac.id,
wiwiek.rukmi@upnvj.ac.id

Abstract

The drug problem is a complex and transnational problem which requires cooperation to eradicate it. ASEAN has agreed to free the region from drugs through the Drug Free ASEAN 2015's declaration. ASEAN is committed to strengthening cooperation in overcoming drug abuse with a jointly designed work plan. The research purposes of this article are to understand implementation of Indonesia's cooperation with ASEAN countries in the 2015 ASEAN drug-free program as an effort to overcome narcotics abuse, especially with Thailand. This research uses a qualitative approach, using theory of regionalism and international cooperation to analyze the data. The results show that the cooperation between Indonesia and Thailand apart from the current massive drug problem, the cooperation between Indonesia and Thailand using two strategies, namely law enforcement and alternative development, has proven to be able to reduce these problems. Finally, ASEAN Work Plan on Securing Communities Against Illicit Drugs 2016-2025 was made based on these achievements.

Keywords: Indonesia-Thailand Cooperation, Drugs, ASEAN, Drug Free ASEAN 2015

Pendahuluan

Penyalahgunaan Narkotika obat- obatan terlarang (NARKOBA) ataupun NAPZA (Narkotika, Psikotropika, serta Zat Aditif) telah jadi fenomena global serta ialah ancaman kemanusiaan (human threat) untuk sesuatu negeri, tidak terlepas juga ASEAN mendapatkan masalah yang sangat berbahaya berdasarkan nilai atau jumlah pengguna yang semakin naik setiap tahunnya. Pemicu dari kenaikan dan meluasnya penyalahgunaan narkoba adalah kecanggihan teknologi data, dimana pemasok, pengedar, dan pengguna dapat berkomunikasi dengan cepat dan mudah melalui internet. Jumlah populasi manusia di ASEAN terus meningkat tiap tahunnya dan merupakan yang tertinggi ketiga setelah China dan India. Dari total populasi ASEAN, 65,6 pengguna narkoba dirawat per 100.000 populasi pada tahun 2019.

Indonesia berada di jalur internasional perdagangan dengan jumlah penduduk terbesar di Asia Tenggara. Selain wilayah nusantara ditambah dengan alam dan manusia yang ada sumber daya, Indonesia juga merupakan daerah potensial untuk transit. Masalah penting di Indonesia adalah kebijakan di Negara Indonesia yang mana dianggap masih kurang dalam penanganannya narkoba serta kondisi peredaran narkoba di Indonesia jelas sangat mempengaruhi pasar narkoba Asia Tenggara. Sebanyak 6.359 klien dirawat di perawatan penyalahgunaan narkoba di Indonesia selama tahun 2006.

Thailand pun menjadi salah satu dari negara segitiga emas atau gold triangle Myanmar dan Laos. Kedua negara ini menjadi sumber terbesar dunia dari hasil narkotika dan obat-obatan terlarang seperti opium. Daerah pegunungan yang berbatasan dengan Laos, Myanmar, dan Thailand dikenal sebagai daerah penanaman dan pemasaran opium selama berabad-abad. Menurut Taskariana (2010: 205),

kawasan gold triangle memiliki lahan penanaman opium dengan luasnya yaitu 190.520 hektar dan dapat memproduksi 2.790 kg pasta opium per tahunnya. Selain itu, turunan bahan utama untuk menghasilkan heroin dan morfin berasal dari turunan pasta opium.

Seiring dengan situasi narkoba yang sudah mengancam kehidupan serta kecenderungan globalisasi, yang mengakibatkan perdagangan narkoba tidak lagi bersifat perorangan namun jaringan berskala besar dengan kekuatan organisasi, modal, kapasitas perdagangan yang bersifat transnasional dan dikenal sebagai '*transnational organized crime*' menurut *United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC)* (BNN, 2018) . Perkembangan tersebut membuat pemberantasan narkoba menjadi lebih kompleks.

Pada Pertemuan Tingkat Menteri ASEAN ke-33 pada Juli 2000, Pemerintah menegaskan keprihatinannya terhadap ancaman dari pembuatan, perdagangan dan penyalahgunaan obat-obatan terlarang terhadap keamanan dan stabilitas kawasan ASEAN dan sepakat untuk memajukan sasaran tahun mewujudkan ASEAN Bebas Narkoba hingga tahun 2015. Kemudian daripada itu dibentuklah sebuah workplan sebagai acuan negara-negara ASEAN menyikapi Drug Free ASEAN 2015 ini.

Selaku sesuatu komitmen kawasan, tiap negeri anggota ASEAN tercantum Indonesia serta Thailand membagikan sokongan politik secara penuh buat bersama- sama mengalami ancaman peredaran hitam narkoba serta obat- obatan terlarang demi keamanan serta stabilitas kawasan ini menampilkan terdapatnya upaya berkontribusi dalam upaya pencapaian sasaran Drug Free ASEAN 2015. Berangkat dari persoalan tersebut Drug Free ASEAN 2015 yang telah disetujui serta diresmikan oleh negara-negara anggota ASEAN sebagai bentuk

usaha dalam pemberantasan persoalan narkoba di ASEAN dengan upaya mengurangi peredaran serta penggunaan narkoba yang selama ini dialami oleh negara-negara ASEAN. Dengan bergabungnya Indonesia dan Thailand dalam deklarasi Drug Free ASEAN 2015 merupakan salah satu upaya Kerjasama yang terjalin dalam pemberantasan narkoba. Kerjasama kesepakatan kedua negara ini berdasarkan pada deklarasi Drug Free ASEAN 2015.

Wulansari (2013) menyatakan bahwa Thailand melakukan upaya internal dan eksternal dalam penanggulangan permasalahan narkotika dan obat-obatan terlarang menuju Drug-Free ASEAN 2015. Langkah penanggulangan narkotika dan obat-obatan terlarang secara internal oleh Thailand dilakukan dengan menggunakan panduan yang dihasilkan dalam Study on Achieving Drug-Free ASEAN 2015 Status and Recommendation.

Sigalingging (2015) menjelaskan beberapa kebijakan yang dilakukan Indonesia sebagai upaya mewujudkan Drug-Free ASEAN 2015. Tindakan yang secara internal yang dilakukan Indonesia salah satunya adalah melaksanakan kebijakan Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN). Berbagai upaya dilakukan Indonesia guna mewujudkan Drug-free ASEAN 2015, namun dalam perjalanannya Indonesia bertemu dengan berbagai macam persoalan dan hambatan. Beberapa hambatan tersebut seperti, SDM yang tidak memadai, keterbatasan ekonomi, lemahnya system hukum, dan jumlah permintaan yang meningkat

Berdasarkan paparan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Kerjasama Indonesia-Thailand

dalam memberantas peredaran narkoba untuk mencapai Drug Free ASEAN 2015?”

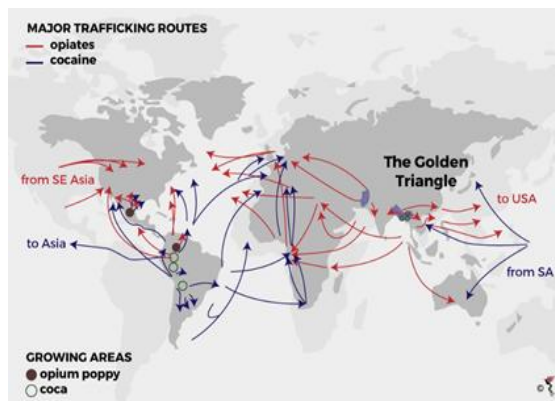
Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, menggunakan *in-depth analysis*. Pendekatan kualitatif ialah pendekatan yang lebih berfokus pada pemahaman mendalam mengenai suatu masalah dibandingkan dengan melihat permasalahan untuk penelitian secara generalisasi. Selanjutnya, peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif yaitu dapat memungkinkan peneliti untuk dapat menghasilkan deskripsi mengenai fenomena sosial yang di teliti, dalam hal ini pemberantasan narkoba melalui program *drug-free* ASEAN yang diselenggarakan pada tahun 2015. Peneliti menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang berarti suatu penelitian yang pusat perhatiannya berfokus kepada permasalahan-permasalahan narkoba dan kerja sama antara Indonesia dan Thailand dalam program *drug-free* ASEAN 2015 dan hasil penelitian yang kemudian diolah lalu dianalisis untuk dapat diambil kesimpulan.

Hasil

Perkembangan Narkoba di Thailand

Narkoba yakni menjadi salah satu kategori ancaman keamanan non tradisional yang sekaligus menjadi fenomena global diseluruh pelosok negara salah satunya Asia Tenggara. Terdapat segitiga emas yang biasa disebut dengan The Golden Triangle yang terletak pada daerah Thailand utara, Laos bagian barat, dan Myanmar bagian timur lokasi ini kah dimana narkotika jenis heroin dan amphetamine diproduksi dan disebarkan bukan hanya ke kawasan Asia Tenggara tapi ke seluruh kawasan global (BNN, 2009).



The Golden Triangle ini memasok sejumlah besar narkotika, semisal: pil shabu ke seluruh wilayah dan sejauh Eropa dan Australia, yang memiliki tingkat kecanduan per kapita tertinggi di dunia. Ini berarti bahwa sebagian besar produksi shabu di Asia Tenggara memenuhi permintaan regional, tetapi sejumlah besar juga diperdagangkan ke bagian lain dunia karena pasar yang tumbuh secara aktif. Hal ini sangat relevan di era integrasi regional saat ini dan pengurangan pembatasan perbatasan di Asia Tenggara, yang memiliki potensi nyata untuk meningkatkan perdagangan narkotika dan prekursor lintas batas.

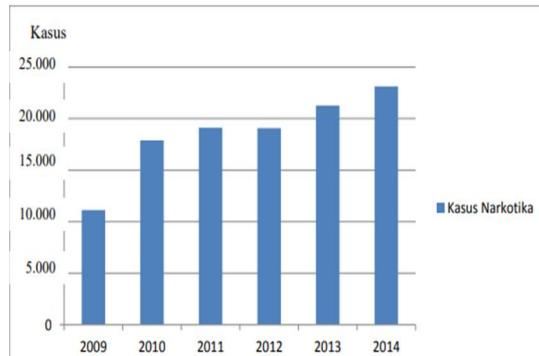
Thailand pada daerah utara menjadi pintu utama bagi perdagangan narkotika di Thailand. Bermula sejak komunitas etnis utara berinteraksi, dibawah obat-obatan terlarang tersebut seperti ganja, opium. Penyalahgunaan narkotika disebabkan karena adanya faktor mendukung yaitu ketersediaan obat-obatan dan narkotika oleh beberapa faktor yakni adanya ketersediaan obat-obatan di Thailand secara bebas dan luas sehingga diperjualbelikan karena memberi hasil keuntungan besar. Karena begitu, Thailand masuk kedalam jangkauan jaringan mafia narkotika internasional, dan memiliki kaum atau gerakan separatis yang mendanai para petani untuk meningkatkan produksi dan penjualan. Penyalahgunaan narkotika di Thailand sendiri memiliki grafik yang naik turun, puncak tingginya

kenaikan ini terjadi pada 2009 sampai 2011 dimana kenaikan secara signifikan terjadi dari 140.000 hingga 160.000 kejadian. Sementara survei sendiri membuktikan adanya pencapaian sebesar 157 ha peredaran atau produksi di Thailand bagian utara ditemukan pada 10 provinsi bagian utara (UNODC, 2006).

Ukuran wilayah budidaya opium di Thailand pada tahun 2008 diperkirakan sebesar 288 ha, mendapatkan sedikit kenaikan dari 231 ha di tahun 2007. Dibandingkan dengan 3,6 ton di tahun 2007, terjadi peningkatan penghasiian opium di tahun 2008 sebanyak 15,6 kg/ha. Namun, pada tahun 2008 sekitar 98% poppy sudah dilenyapkan dengan pengadaan opium bersih sekitar 56 kg. Dengan adanya informasi bahwa selama 2 tahun penuh akan ada kenaikan budidaya opium poppy secara signifikan, maka pihak berwenang coba untuk melakukan sosialisasi mengenai rencana pengendalian tanaman yang fokusnya adalah melakukan program penanaman di wilayah terpencil dan daerah di Utara Thailand yang ditumbuhi tanaman opium.

Perkembangan Narkoba di Indonesia

Berdasarkan riset yang dilakukan BNN pada tahun 2011 didapatkan bahwa penggunaan narkoba di Indonesia telah mencapai sebanyak 4,2 juta orang dari keseluruhan populasi yang ada dengan rentang usia sekitar 10-59 tahun. dengan angka prevalensi yang mencapai 2 ini telah banyak dipergunakan oleh pekerja transportasi dalam satu tahun terakhir dimana Hallucinogen, Transquilize, Opiad dan Inhalant menduduki kategori rendah konsumsi sebanyak 1%, ATS sebanyak 2,3%, dan tertinggi ialah ganja sebesar 4,9% (Anggraini, 2006)



Dari tabel diatas terlihat adanya peningkatan yang begitu tinggi, dimana terlihat Pada tahun 2009 ke 2010 kasus narkoba meningkat 60,66% dari 11. 140 kasus menjadi 17.898 kasus. Pada tahun 2010 ke 2011 hadapi kenaikan sebesar 6, 87% dari 17. 898 jadi 19. 128 permasalahan. Sebaliknya pada tahun 2012 hadapi penyusutan permasalahan ialah dekat 0, 25% dari 19. 128 permasalahan jadi 19. 081 permasalahan. Pada tahun 2013 kembali hadapi kenaikan 11, 47% dari 19. 081 permasalahan jadi 21. 269 permasalahan. Setelah itu pada tahun 2014 kembali hadapi kenaikan sebesar 8, 77% dengan 23. 134 kasus (BNN, 2015)

Penggunaan narkoba yang begitu banyak di Indonesia membuat Indonesia menjadi pasar narkoba yang cukup menjanjikan dimana ini sesuai dengan apa yang dprinsipkan dalam ekonomi yakni kebutuhan yang tinggi menyebabkan permintaan meninggi pula. Indonesia jelas mau untuk menjadi surge para pengguna narkoba melihat pasar yang menjanjikan ini, namun Indonesia sebagai anggota ASEAN (Association of South East Asian Nations) berupaya untuk mengurangi kasus-kasus penggunaan narkoba dimana hal ini telah diucapkan dalam konvensi Joint Declaration for a Drug Free ASEAN 2015.

Drug Free ASEAN 2015

Adanya perkembangan peredaran dan pemakaian narkotika serta obat bius di Asia Tenggara yang terus bertambah tiap tahunnya.

Ditambah memandang permasalahan drugs trafficking yang selalu hadapi kenaikan, ASEAN mendeklarasikan Drug Free ASEAN 2020. Hendak namun, anggota ASEAN setuju buat memesatkan pelaksanaan Drug- Free ASEAN yang awal mulanya tahun 2020 diganti jadi 2015, perihal ini sudah disepakati oleh seluruh anggota ASEAN. Sesuai dengan tujuan utama dari kerjasama yang ASEAN lakukan yakni untuk mencegah penyebaran penyalahgunaan narkoba sehingga dapat membuat ASEAN menjadi kawasan bebas narkotika di tahun 2020 dan hal ini pun telah dicantumkan dalam ASEAN Vision 2020 serta Hanoi Plan of Action

Drug Free ASEAN ini menghasilkan Kawasan yang leluasa dari narkotika serta obat-obatan terlarang yang ditunjang dengan prosedur yang dibuat dan dilaksanakan dalam skala nasional dan internasional. Kerangka kerja regional ASEAN mengarah Drug- Free 2015 dibagi dalam 2 berbagai, ialah ACCORD(ASEAN-China Cooperatative Operation in Response to Dangerous Drugs), serta ASOD(ASEAN Senior Officials on Drug matters). Drug Free mempunyai kerangka kerja regional buat pengendalian narkoba sejalan dengan rezim global serta tertuang dalam ACCORD rencana aksi. Rencana ini merupakan kerangka kerja berbasis kegiatan dengan fitur- fitur berikut:

1. Mempromosikan pemahaman warga serta reaksi sosial dengan secara proaktif mengadvokasi bahaya narkoba.
2. Kurangi mengkonsumsi obat- obatan terlarang dengan membuat komitmen dan pelaksanaan yang nyata untuk mengurangi permintaan.
3. Memperkuat supremasi hukum dengan jaringan aksi kontrol yang ditingkatkan serta hukum yang lebih baik kerjasama penegakan serta tinjauan legislatif; Melenyapkan ataupun secara signifikan kurangi penciptaan

tumbuhan narkotika ilegal dengan tingkatkan program pengembangan alternatif (United Nations Office on Drugs and Crime Regional Centre, 2015)

Kerjasama Indonesia Thailand

A. Thailand Goes To Campus

Pada tanggal 1-2 Oktober 2013 Indonesia dan Thailand melakukan kerjasama dalam upaya pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba (P4GN) melalui berbagai kampanye dan ide-ide yang dituangkan dalam berbagai kegiatan positif. "Thailand Goes to Indonesia." mengunjungi sekolah-sekolah dengan maksud tujuan untuk mengampanyekan aktivitas penangkalan penyalahgunaan narkoba, selaku "*study visit*" serta riset banding. Aktivitas tersebut bertujuan untuk menolong serta mendesak pemuda baik di Indonesia ataupun segala dunia, membagikan pemecahan kepada permasalahan- kasus narkoba dan memberikan ruang diskusi yang lebih luas dalam hadapi permasalahan narkoba. Tidak cuma itu, kunjungan tersebut bertujuan untuk meningkatkan kepedulian kepada pemuda- pemuda, menyadarkan mereka hendak adanya peran dan tanggung jawab besar dalam menjauhi penyalahgunaan narkoba disaat ini yang sudah berkembang dalam lingkup global serta silih memberikan informasi melalui peran pemuda dimana pemuda dapat berbagi informasi kembali kepada teman maupun keluarga.

Mengenai tersebut diharapkan hendak membuka pemikiran pemuda yang hendak jadi generasi penerus bangsa betul- betul mempunyai andil besar dalam menjauhi penyalahgunaan narkoba, mengingat banyaknya pemuda yang terjerat dalam permasalahan narkoba yang hanya menawarkan akibat instan maupun" instant

effect" (Hukum Online, 2013). Dengan adanya edukasi seperti itu hal ini memberikan edukasi baik bagi generasi-generasi muda akan buruknya penyalahgunaan narkoba dan supaya uraian seluruh anak muda di Indonesia senantiasa sama, kalau narkoba tidak hendaknya digunakan. Peredaran narkoba dapat dicoba lewat apa saja. Apalagi, terdapat sebagian metode yang bisa jadi sampai saat ini masih belum teridentifikasi, sehingga penyalahgunaan masih sangat bisa jadi terjalin. Area pemuda jadi sasaran empuk para pemasok sebab iming-iming khasiat yang bisa jadi didapat sehingga inilah yang dijadikan akar dari dibuatnya *Thailand goes to campus* yang dilakukan.

Hal ini dilakukan pemerintah untuk lebih serius menekan angka pengguna narkoba di kalangan remaja secara khusus. Karena seperti yang kita tahu bahwa lingkungan usia muda sekitar 15-35 tahun sangatlah rentan akan adanya lingkaran narkoba. Tidak jarang para bandar narkoba menargetkan pemuda-pemuda atau anak usia remaja untuk menjadi target pasar mereka. Pergaulan mereka yang luas serta secara psikologis mereka yang rasa ingin tahunya masih sangat tinggi dan cenderung tidak berfikir Panjang membuat mereka mudah terjerumus dalam narkoba.

Bahkan, jika dilihat dari data terkini, Berdasarkan data dari Badan Narkotika Nasional (BNN), Dari angka 3,6 juta pengguna narkoba, 70% di antaranya adalah masyarakat dalam usia produktif. Yang lebih menyedihkan lagi, dari angka tersebut, sebanyak 27% pengguna narkoba dari kalangan pelajar dan mahasiswa. Itu merupakan jumlah yang cukup besar. Pelajar Indonesia yang seharusnya menjadi harapan masa depan Indonesia malah menjadi jumlah terbesar pengguna narkoba dan jika kita telaah Kembali, pelajar terlebih lagi mahasiswa merupakan masyarakat yang berintelektual. Kebiasaan dalam menganggap narkoba merupakan pelanggaran yang ringan itulah yang sudah saatnya ditepis. Sejak usia

dini sebelum mereka memiliki kemungkinan untuk mengenal narkoba sudah sebaiknya ditanamkan nilai-nilai anti narkoba sebagai antisipasi peningkatan tahun ke tahun.

Kegiatan Thailand Goes to Campus yang melibatkan dua negara ini, menjadi bukti implementasi dari bentuk Kerjasama Internasional yang pada dasarnya memiliki arti, suatu negara memiliki tujuan, arah serta keinginan yang sama yang didukung oleh kondisi yang saling membutuhkan (Kaetasasmita, 1997) . Pemberantasan narkoba tidak dapat dilakukan pada satu titik. Menghentikan satu titik tidak akan menghentikan putaran narkoba yang sudah melibatkan banyak titik. Begitu pula dalam pencegahannya Kerjasama Indonesia dan Thailand merupakan bentuk dari Kerjasama Internasional itu sendiri karena miliki tujuan yang sama dengan saling membantu.

B. Kunjungan

Kunjungan juga coba dilakukan pada bentuk Kerjasama Indonesia dan Thailand contohnya: terdapat kunjungan untuk pemuda provinsi Banten di BNNP Banten yang diharapkan bisa melaksanakan perihal yang sama buat memiliki rasa kepedulian yang amat besar dalam mewujudkan (P4GN) mengarah Indonesia Leluasa Narkoba 2015. Kerjasama ini diadakan oleh Departemen Luar Negara Thailand, the Office of the Narcotics Control Board (ONCB) serta the Ministry of Education and the Asia- Pacific Non- Government Organization on Drug and Substance Abuse Prevention dengan Badan Narkotika Nasional Indonesia (Hukum Online, 2013). Dalam kegiatan ini, Kepala BNNP Banten menekankan dua hal penting yaitu pertama, apresiasi untuk Forkopimda yang sejauh ini terus memberikan dukungan pada kegiatan P4GN di Banten. Kedua, Banten diharapkan menjadi

wilayah Bersih dari Narkoba atau Bersinar. Sebagai langkah persiapan menuju desa bersinar, dibutuhkan para penggiat anti narkoba yang handal. Karena itulah, BNN melatih seratusan personel dari unsur desa, untuk menjadi penggiat anti narkoba. Untuk mewujudkan wilayah bersinar ini, maka strategi yang ditempuh antara lain; melakukan upaya pencegahan, penegakkan hukum, rehabilitasi, sinergitas dengan instansi terkait, dan peningkatan peran serta masyarakat di lingkungan kerja, pendidikan dan masyarakat.

Melatih unsur desa mulai dari kepala desa hingga ketua RT atau RW guna meningkatkan kewaspadaan masyarakat akan penggunaan serta penyebaran narkoba. Lokasi pedesaan tidak senantiasa menjamin bahwa akan terlepas dari narkoba. Rendahnya pengetahuan serta sarana informasi membuat masyarakat desa bisa saja menjadi sasaran narkoba. Karena itu pentingnya visi misi yang sama dari hulu hingga hilir, dari pemerintah pusat hingga perangkat desa.

Jika dalam ranah internal saja pemerintah sudah sepatutnya satu visi misi maka dalam skala internasional dimana persoalan narkoba ini merupakan persoalan yang transnasional sudah seharusnya saling bahu membahu, bantu membantu dalam pemberantasan narkoba. Kerjasama Indonesia-Thailand tidak hanya melibatkan pemerintah dalam penanggulangannya tidak melulu perihal perbatasan dan perundang-undangan. Kerjasama Indonesia-Thailand juga melibatkan Non-Government Organisation (NGO), seperti dalam kunjungan di Banten yang melibatkan serta the Ministry of Education and the Asia-Pacific Non- Government Organization on Drug and Substance Abuse Prevention. Hal ini memberi bukti nyata implementasi kerjasama Indonesia dan Thailand yang melibatkan masyarakat didalamnya. Diharapkan semakin banyak NGO yang khususnya bergerak dalam

bidang narkotika yang turut serta menjalankan visi misi Drug Free ASEAN ini.

Bentuk kunjungan Thailand ke Indonesia yang juga melibatkan NGO merupakan suatu kegiatan yang mengimplementasikan Kerjasama regional menurut Fawcett, regionalisme merupakan peraturan atau kebijakan di mana delegasi negara dan non-negara melakukan koordinasi dan kerjasama membentuk strategi dalam suatu wilayah regional. Hal tersebut merupakan koordinasi yang baik antara aktor negara dan non-negara yang menjadikan kegiatan ini merupakan implementasi dari adanya Kerjasama regional yang baik.

C. Pertukaran Informasi

Menurut Dhini Dwi Kerjasama Indonesia dan Thailand juga diperlihatkan oleh adanya komunikasi interaktif yang baik,

“Intensifikasi komunikasi dan pertukaran informasi merupakan praktik yang berhasil dilakukan di kedua negara. Adanya ketersediaan informasi peredaran narkoba, terutama yang menuju ke Indonesia, memudahkan kita dalam melakukan langkah-langkah preventif, penangkalan dan deteksi dini ketika masuk ke wilayah Indonesia. Harapannya jaringan sindikat internasional dapat diungkap.” (Dhini Dwi Mandiri, 2021)

Pertukaran informasi menjadi juga hal yang sangat penting, dimana kerjasama memiliki permasalahannya bukan cuma terletak pada identifikasi sasaran- sasaran bersama serta tata cara buat mencapainya. Namun terletak pada pencapaian sasaran itu. Pertukaran data juga hendak diusahakan apabila khasiat yang diperoleh diperkirakan hendak lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang wajib ditanggungnya. Cocok dengan tujuannya,

kerjasama internasional bertujuan buat kesejahteraan bersama. Sebab ikatan Kerjasama bilateral bisa memusatkan proses kenaikan kesejahteraan serta penyelesaian permasalahan diantara dua ataupun lebih negeri tersebut.

Kemajuan informasi serta globalisasi yang menjadikan dunia tanpa batas tidak hanya memiliki dampak positif namun juga negative jika disalah gunakan. Kemudahan mendapatkan informasi menjadikan pergerakan narkoba menjadi sangat cepat dan luas. Memudahkan adanya transaksi, pengiriman barang dari negara satu ke negara lain, perkembangan obat-obatan itu sendiri dan lain lain.

Variant narkoba selalu bergerak dinamis dan terus mengalami inovasi. Jenis-jenis baru yang bahkan kadang belum ditemukan mesin pendeteksinya. Ini pula yang membuat pemerintah kewalahan menghadapi perkembangan narkoba karena berjalan sangatlah kecepat. Disaat pemerintah belum benar-benar selesai mendeteksi variant sebelumnya, dan belum sempat membuat aturan atau regulasi mengenai variant sebelumnya, para produsen narkoba sudah menghasilkan variant baru.

Pemerintah dinilai lambat akan menghadapi fenomena narkoba ini. Pergerakan narkoba di luar sana tidak seiringan dengan apa yang pemerintah lakukan secara internal maupun eksternal. Dengan adanya pertukaran informasi ini pemerintah tidak hanya bertukar informasi mengenai perbatasan, pengaman, dan aturan-aturan saja, namun juga mengenai perkembangan jenis-jenis narkoba, pergerakan narkoba, pertukaran teknologi guna mempercepat proses pemberantasan narkoba seperti yang di harapkan.

Pertukaran infomasi inipun menjadi sarana komunikasi agar terciptanya hubungan yang harmonis antar negara serta mencegah

akan adanya miss communication antar negara dalam hal ini Indonesia dan Thailand. Kembali lagi mengingat bahwa persoalan narkoba merupakan persoalan yang kompleks dan transnational, tidak dapat diselesaikan secara sebelah pihak, tentunya harus melibatkan negara lain.

D. Alternative Development

Menurut Dhini Dwi Mandiri, selaku Analisis Kerjasama Regional dan Internasional BNN:

“Inisiatif kerja sama bilateral antara BNN dan ONCB utamanya dilatarbelakangi oleh keberhasilan Thailand dalam bidang pemberdayaan alternatif. Thailand berhasil mengalihfungsikan budidaya tanaman ilegal yaitu opium menjadi budidaya tanaman lain yang produktif dan legal, serta membangun dan mendayagunakan kawasan bekas ladang opium dan masyarakatnya menjadi lebih berdayaguna.” (Dhini Dwi Mandiri, 2021)

Program alternative development di Mukim Lamteuba telah dilakukan sejak tahun 2006. Program alternative development ini memberikan pengembangan alternatif, yang mencakup bantuan pertanian, dukungan akses pasar dan peningkatan infrastruktur, memberi keluarga petani yang dahulu ialah petani opium penghasilan yang stabil dan anak-anaknya kesempatan untuk hadir. sekolah dan rencana untuk pendidikan tinggi. Konservasi lingkungan, promosi pengelolaan sumber daya nasional dan perlindungan flora dan fauna dan keanekaragaman hayati serta rasa kepemilikan dan partisipasi masyarakat diidentifikasi sebagai kunci ketika merencanakan dan menerapkan intervensi dan strategi pembangunan alternatif. lewat landasan Peraturan Presiden No 2005 dalam kaitannya dengan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2004-2009, Pemberantasan penyalahgunaan narkotika menjadi prioritas pemerintah agar Indonesia menjadi negara bebas narkoba. Untuk bisa mewujudkan hal tersebut, maka pokok utama programnya ialah:

1. Hukum terkait narkoba ditingkatkan
2. Masyarakat yang memiliki keterampilan dan kapasitas ditingkatkan kemampuannya
3. Rehabilitasi bagi para pecabdh ditingkatkan baik
2. Komunikasi, instruksi, ataupun informasi ditingkatkan
3. SDM, anggaran, administrasi, prasarana dan sarana ditingkatkan kualitasnya
4. Dalam PGN, partisipasi pemuda sangat diperlukan sehingga modelnya perlu dikembangkan
5. Kampanye dan sosialisasi anti narkoba perlu diadakan
6. Mengembangkan penyidikan dan menegakkan hukum terkait pangan dan kesehatan

Alternative development ini berjalan sesuai dengan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan dari adanya penanaman tanaman yang legal yaitu nilam, jabon, kunyi, dan lain-lain. Contohnya seperti tanaman nilam yang dapat dimanfaatkan minyaknya saat panen dan jabon dalam kurung waktu relative tidak alam dapat dimanfaatkan kayunya.

Program pemerintah dalam alternative development ini sangatlah rinci, hal ini belajar dari apa yang telah dilakukan Thailand terdahulu yang berhasil melakukan alternative developmentnya. Dengan dukungan berbagai lapisan dari pusat hingga lapisan RT dan RW serta Kerjasama yang erat dan kooperatif antar dua negara ini membuahkan keberhasilan yang masih terus berjalan hingga saat ini.

Implementasi dari Kerjasama Indonesia dan Thailand khususnya dalam alternative development ini merupakan bentuk dari Regionalisme yang berarti proses interaksi antara pihak internal dan eksternal yang mungkin tidak jauh secara geografis tetapi membentuk identitas politik atau ekonomi yang terletak pada skala yang sama (Hook, 2002) . Kedekatan Indonesia dan Thailand juga dalam hal geografis mempermudah Indonesia dan Thailand dalam menjalin Kerjasama serta menemukan solusi yang tepat untuk implementasi dari Alternative development ini.

E. Law Enforcement

Menurut Dhini Dwi Mandiri selaku Analisis Kerjasama Regional dan Internasional BNN:

“Menurut saya, ini akan berhasil jika baik kita maupun negara yang bekerjasama dengan kita dalam hal ini Thailand, memperkuat hukum nasional terkait narkoba dan penegakannya. Juga memperkuat kerja sama baik bilateral, regional maupun internasional.” (Dhini Dwi Mandiri, 2021)

Dalam kutipan wawancara tersebut peneliti melihat adanya penguatan hukum nasional yakni berbicara mengenai law enforcement, ini melihat dimana Indonesia dan Thailand sama sama memiliki hukum atau prinsip yang menerapkan atau memperkuat pencegahan, penegakan, dan langkah-langkah untuk memerangi kejahatan narkoba. Hal ini dapat dilihat dari ASITF yang merupakan wadah para penegak hukum untuk berkolaborasi, koordinasi, serta mengambil inisiatif saat melakukan interdiksi lalu lintas peredaran narkoba. Salah satu tindakan itu yakni melalui cek poin di pelabuhan internasional yang berada di kawasan pelabuhan ASEAN (Eksa, n.d.).

Sementara AITF yakni wadah terkait dengan tantangan dan masalah yang belum terpecahkan salah satunya narkotika, yang menggarisbawahi perlunya penelitian medis yang sedang berlangsung. Kerjasama yang dilakukan Indonesia dan Thailand yakni juga dengan terus melakukan adanya komunikasi yang membuat satu sama lain terus melakukan adanya pertukaran informasi mengenai peredaran narkotika yang terjadi ini. Hal ini termasuk BNN dan ONCB juga bekerja sama di lingkup ASEAN melalui satgas interdiksi laut. Beberapa kasus peredaran narkoba berjumlah besar berhasil digagalkan karena adanya pertukaran informasi antar negara ASEAN.

Masing-masing negara dengan masing-masing prinsip melakukan Law Enforcement yang mana Thailand langsung membuat langkah berupa peningkatan rehabilitas dan membagikan pengobatannya untuk para pecandu. Sebagai oengguna narkoba, sebagai ahli mengatakan bahwa mereka tidak akan melkukan rehabilitas ataupun mengambil pengobatan karena takut akan ditangkap. Survey menyebutkan bahwa pada 24 Maret - 4 April 2003 terdapat 3066 orang yang berada di pusat rehabilitasi dan 6% diantaranya belum pernah menggunakan narkoba, sedangkan 50%-nya memilih untuk berhenti menggunakan sebelum benar-benar kecanduan. Dengan survey yang dilakukan ditahun 2000, telah diperkirakan bahwa sebangak 30.000 pengguna perlu dirawat dan direhab (Rights, 2004)

Sementara, upaya yang dicoba buat menghindari penyalahgunaan narkotika di Indonesia ialah dimana BNN senantiasa membagikan edokasi pengetahuan bagi segala warga banda aceh (daerah rawan narkotika) tentang bahaya narkotika, baik penyeluhan disekolah, baik data dijalan- jalur, semacam spanduk, jadi warga itutau tentang bahayanya narkoba. Setelah itu membagikan data

kepada warga supaya warga sadar hendak bahaya narkoba, sebab narkoba bisa mengganggu psikologi sipemakainya, bangsa serta negeri, kemudian pula merusak areamenasihati sekolah, melakukan urinalisis sebulan sekali dan berbagi ilmu dengan masyarakat, menyiarkan sosialisasi melalui radio, televisi dan majalah. Kemudian memasang spanduk di jalan-jalan dan memberikan nasihat kepada desa-desa.

Perbedaan fokus anantara Indonesia dan Thailand sangatlah wajar karena disesuaikan dengan kondisi keadaan masyarakatnya serta kesiapan pemerintahnya. Dalam pemecahan permasalahan narkoba ini, negara tak dipungkiri hanya akan bisa menyelesaikannya jika membentuk adanya kekuatan regional baik bilateral maupun multilateral untuk mencapai tujuan masing-masing menjadi tujuan bersama yang diagendakan karena sudah jelas akan adanya suatu prospek keuntungan timbal balik jika dilakukan adanya kerjasama atau kesamaan persepsi soal ancaman eksternal yang terjadi ini. Gunanya ialah bukan hanya sebagai tujuan bersama namun juga sebagai suatu wadan dan modal untuk melakukan respon oleh adanya tantangan dari luar dan mengkoordinasikannya pada forum negosiasi atau pertemuan bilateral yang dapat dilakukan, nilai-nilai bersama yang dibangun dapat meningkatkan adanya interdependensi regional yang melahirkan sebuah keinginan bersama menyelesaikan permasalahan yang mengganggu adanya stabilitas kawasan.

Negara memiliki tujuan, arah serta keinginan yang sama yang didukung oleh kondisi yang saling membutuhkan. Kerjasama ini berlandaskan kepentingan antar negara akan tetapi kepentingan tersebut tidak identic (Kaetasasmita, 1997) , dengan pengertian diatas dapat penulis simpulkan bahwa tujuan yang sama antara Indonesia dengan Thailand dalam pemberantasan narkoba dengan melakukan

Kerjasama meski dengan adanya penyesuaian secara detail sesuai dengan keadaan negaranya masing masing.

Hambatan Kerjasama Penanggulangan

Narkotika

Hambatan tentu ada dalam melaksanakan adanya tujuan bersama mengakhiri permasalahan narkoba ini, salah satu contohnya ialah permasalahan dana yang menghambat proyek alternative development yang sudah dinanti-nantikan dibangun di Indonesia, selain itu kurangnya kesadaran jika permasalahan ini memang permasalahan yang cukup sulit dihadapi dan kurangnya komitmen dari negara-negara ASEAN dalam banyak hal salah satunya kontribusi dana. Misalnya, Malaysia dan Laos saat semua negara memberikan dana untuk proyek yang akan dijalankan mereka justru tidak memberikan sedikit saja kontribusi dana. Dalam segi perbatasan lemahnya pengelolaan perbatasan negara-negara Asia Tenggara sehingga memudahkan para kurir drug trafficking untuk mendistribusikan drugs keseluruh penjuru daerah yang memungkinkan dan strategis faktor geografis Asia Tenggara yang notabene penuh dengan hutan, pegunungan, dan perairan membuat pengawasan sulit diterapkan. Ditambah lagi luas wilayah Asia Tenggara yang menghambat para pemangku untuk meminimalisir perjual belian narkoba.

Disisi lain menurut Dhini Dwi Mandiri selaku Analisis Kerjasama Regional dan Internasional BNN RI: “Hambatan dan tantangannya ialah dimana modus operandi dan jalur yang selalu berubah.” (Dhini Dwi Mandiri, 2021)

Modus operansi ialah bagaimana cara pengoperasian kelompok penjahat yang membawa atau yang mengedarkan narkotika ini dalam menjalankan rencana kejahatannya. Lemahnya perbatasan dan lainnya

negara-negara yang justru hanya berfokus pada keamanan tradisional seperti hanya memberantas sumber produksi saja namun pihak berwenang di Asia Tenggara mengalami kesulitan untuk membendung peredaran narkoba dari sumbernya. Kemudian perkembangan narkotika yang sangat massif dan terus menerus melahirkan jenis serta golongan obat baru yang membuat badan pengawas narkoba tidak hanya di Indonesia dan Thailand kewalahan untuk meriset dan mendeteksi narkotika tersebut.

Kesimpulan

Isu narkoba tidaklah perihal yang baru, persoalan narkoba semakin lama semakin menjadi persoalan yang kompleks yang mengancam keamanan sebuah negara dan sangat merugikan generasi bangsa. Menanggapi hal tersebut, ASEAN sudah tingkatan komitmen buat mempererat kerja sama dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba dengan mencanangkan program ASEAN Leluasa Narkoba 2015(Drug- Free ASEAN by 2015). Deklarasi Drug Free ASEAN 2015 inilah yang menjadi pedoman negara anggota ASEAN untuk turut serta menggalangkan pemberantasan narkoba khususnya di wilayah ASEAN.

Disadari bahwa persoalan narkoba bukanlah persoalan yang mudah dan merupakan kejahatan transnasional yang melibatkan banyak negara dalam pengedaran dan produksinya, Indonesia dan Thailand sebagai sesame negara anggota ASEAN membangun Kerjasama bilateral demi terciptanya lingkungan bebas narkoba di tahun 2015. Kerjasama itu berupa kunjungan sebagai bentuk kampanye anti narkoba kepada masyarakat desa dan pemuda mahasiswa sebagai tongkat estafet kesadaran anti narkoba. Kemudian pertukaran informasi yang melibatkan Indonesia dan Thailand untuk mempercepat adanya penyelidikan maupun informasi perkembangan jenis-jenis

narkoba terbaru. Lalu, adanya alternative development sebagai pembangunan jangka Panjang pasca narkoba guna membangun masyarakat yang lebih sehat dan sejahtera secara fisik dan mental, dan yang terakhir ialah, law enforcement yang di terapkan Indonesia dan Thailand sebagai keseragaman peraturan yang mengatur mengenai narkoba dan pencegahan serta parca narkoba

Daftar Pustaka

- Anggraini, D. (2006). Kebijakan ASEAN dalam Menanggulangi Penyalahgunaan Narkotika dan Obat-Obatan Berbahaya di Asia Tenggara. 41.
- BNN. (2009). Advokasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkoba. 23.
- BNN. (2015). Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) Tahun 2014. *Jurnal BNN RI*.
- BNN. (2018). *Badan Narkotika Nasional*. Retrieved from www.bnn.go.id
- Dhini Dwi Mandiri, S. (2021, oktober). Naskah Wawancara Sarah TabithaRamelan Dengan Dhini Dwi Mandiri. (S. Tabitha, Interviewer)
- Ekxa, G. (n.d.). *Media Indonesia*. Retrieved from RI Serukan ASEAN Bersama Berantas Narkoba:
<https://mediaindonesia.com/internasional/65598/ri-serukan-asean-bersama-berantas-narkoba>
- Emmers, r. (2002, November). *the Securitization of Transnational Crime in ASEAN*. Retrieved from <https://www.rsis.edu.sg/wp-content/uploads/rsis-pubs/WP39.pdf>
- Hook, G. (2002). Regionalism. *Government and Politics*, 4-5.
- Hukum Online*. (2013, September 30). Retrieved from RI-Thailand Kerjasama Berantas Narkoba:
<https://www.hukumonline.com/berita/baca/lt5249a38b25722/ri-thailand-kerjasama-berantas-narkoba>
- Kaetasasmita, K. (1997). *Organisasi dan Administrasi Internasional*. Bandung.

Sigalingging, L. C. (2015). UPAYA INDONESIA MEWUJUDKAN DRUG-FREE ASEAN 2015. *JOM FISIP Volume 2 No. 2* .

Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: PT Alfabeta.

United Nations Office on Drugs and Crime Regional Centre. (2015). *Drug-Free ASEAN 2015: Status and Recommendation*. United Nations Office on Drugs and Crime Regional Centre.

UNODC. (2006). *Opium Poppy Cultivation in The Golden Triangle*. Retrieved from https://www.unodc.org/pdf/research/Golden_triangle_2006.pdf

Wulansari. (2013). *Upaya dan Tantangan Thailand dalam Penanggulangan Narkotika dan Obat Terlarang Menuju Drug Free ASEAN 2015*. Jurnal Analisis Hubungan Internasional.

Deklarasi Kepentingan yang Bertentangan

Penulis menyatakan tidak ada potensi konflik kepentingan sehubungan dengan kepengarangan dan atau publikasi artikel ini.

Acknowledgement

Penelitian ini didukung oleh Program Studi Hubungan Internasional UPN 'Veteran' Jakarta. Saya mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah memberikan wawasan dan keahlian yang sangat membantu penelitian ini. Saya berterima kasih kepada Orang Tua dan Keluarga untuk bantuan untuk komentar yang sangat meningkatkan naskah.

Biografi

Sarah Tabitha Ramelan, merupakan mahasiswi Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Pembangunan 'Veteran' Jakarta. Penulis kelahiran 13 September 1998 yang merupakan mahasiswi Angkatan 2017.

Nurmasari Situmeang, merupakan dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta.

Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, merupakan dosen Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Pembangunan Nasional 'Veteran' Jakarta.